KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Fahri pimpin timwas bencana DPR
Tanggal : Jumat, 11 Januari 2019
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 3

Fahri Pimpin Timwas Bencana DPR

JAKARTA-DPR RI sepakat membentuk Tim Pengawasan (Timwas) Penanggulangan Bencana Nasional. Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah didaulat menjadi pemimpinnya. Hal itu menyusul sejumlah musibah gempa dan tsunami yang melanda di sejumlah wilayah di Indonesia.

Rapat perdana Timwas yang dihadiri Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ermalena (F-PKB), anggota Komisi IX DPR RI, Andi Fauziah (F-Golkar), anggota Komisi IX DPR RI, Verna Gladies Merry Inkiriwang (F-Demokrat) , anggota Komisi V DPR RI, Sadarestuwati (F-PDI Perjuangan), anggota Komisi VI DPR RI, Supratman Andi Agtas (F-Gerindra) dan anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi (F-NasDem) dengan mulai menyusun agenda kegiatan kerja Timwas selama satu masa sidang.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan, dalam waktu dekat, Timwas DPR RI untuk Penanggulangan Bencana akan mengadakan rapat koordinasi dengan semua stakeholder, guna mengidentifikasi masalah yang terjadi. "Satu masa sidang ini kita akan mengadakan rapat dengan mengundang beberapa stakeholder, guna mengidentifikasi masalah serta melihat isu strategis terkait penanganan bencana. Kita juga akan melakukan kunjungan ke lapangan. Salah satu fokus kita adalah memantau sistem mitigasi," ungkapnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (10/1).

Legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu menuturkan, pembentukan Timwas bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan dan rehabilitasi bagi daerah-daerah yang terdampak bencana. Terutama di daerah-daerah yang terkena dampak parah, seperti Sulawesi Tengah, NTB, Lampung dan Banten. "Pembentukan Timwas ini diharapkan dapat mendorong pemerintah agar dapat efektif dan efisien dalam menangani dampak bencana di daerah yang terkena dampak parah," ujarnya.

Terpisah, komisioner Ombudsman, Alvien Lie mengatakan, dibentuknya Timwas Bencana oleh DPR sangat mendukung. Pasalnya, terkait birokrasi menjadi poin utama laporan publik soal lambatnya gerak pemerintah dalam insiden bencana alam di penghujung 2018. "Early warning system untuk tsunami tidak jelas, kan yang berhak menyalakan sirine itu BMKG, tetapi sirine ini dikelola Pemda, sehingga saat BMKG mendapatkan warning dari detector, BMKG harus kontak kepala daerah dulu yang berhak membunyikan, mengapa tidak langsung saja?" kata Alvin di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/1).

Alvin juga menyoroti, adanya badan penanggulangan bencana daerah atau BPBD pada tingkat birokrasinya di lapangan malah diketuai oleh militer. Kehadiran TNI menjadikan gerak instansi yang memiliki kewenangan seperti BPBD jadi kurang leluasa. **(aen)**